

**Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum  
(Studi *Voter Turn-Out* dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pilpres Kabupaten  
Garut Tahun 2009 dan 2014)**

Lia Juliasih  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Garut  
liajuliasih9@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini fokus pada partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif dan presiden khususnya melihat *voter turn-out* di Kabupaten Garut dalam rentang tahun 2009 ke tahun 2014. Partisipasi penting untuk diteliti mengingat keberhasilan dari sebuah pemilu dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori partisipasi politik dan teori pilihan rasional. Terdapat tiga rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, bagaimana peta kenaikan angka partisipasi pemilu legislatif dari tahun 2009 ke 2014 di Kabupaten Garut? Bagaimana peta penurunan angka partisipasi pemilu presiden dari tahun 2009 ke tahun 2014 di Kabupaten Garut? dan apa penyebab kenaikan angka partisipasi pemilu legislatif dan penurunan angka partisipasi pemilu presiden dari tahun 2009 ke 2014 di Kabupaten Garut?

Adapun hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, peta partisipasi pemilih dalam pileg dan pilpres di Kabupaten Garut mengalami kenaikan dan penurunan. *Kedua*, upaya sosialisasi partisipasi politik yang merupakan bagian paling penting dalam sebuah pemilihan umum. Friedmen dan Hechter melihat adanya pengaruh lembaga sosial dalam partisipasi politik. Dalam temuan peneliti terdapat lembaga sosial yang turut berpengaruh dalam menaik-turunkan partisipasi politik masyarakat, yakni: Kepala Desa, Calon legislatif, PPS, dan tokoh agama. *Ketiga*, kedekatan emosional calon pileg dan pilpres turut mempengaruhi partisipasi dan persepsi politik masyarakat. *Keempat*, rasionalitas masyarakat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menentukan partisipasi politik. Pertimbangan ekonomi dan politik uang menjadi salah satu motivasi dalam partisipasi politik. Namun, kedekatan calon dengan pemilih menjadi kunci signifikan dalam pengaruhnya terhadap partisipasi politik masyarakat.

**Kata kunci:** Pileg, Pilpres, Partisipasi Politik, dan Pilihan Rasional

## **1. PENDAHULUAN**

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama dari sebuah demokrasi. Salah satu konsepsi modern diajukan oleh Scumpeter pada tahun 1947 yang menempatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi sebuah sistem politik agar dapat disebut sebagai sebuah demokrasi. Sehingga, partisipasi politik masyarakat berkaitan erat dengan demokrasi suatu negara.

Ciri utama negara demokratis, yakni kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang melaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan, serta masa depan dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Anggota masyarakat secara langsung memilih wakil-wakil yang akan duduk di lembaga pemerintahan. Dengan kata lain, partisipasi langsung dari masyarakat yang seperti ini merupakan pengejawantahan dan penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah dan oleh rakyat.

Partisipasi politik menyoal hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintahan. Sehingga, partisipasi politik erat kaitannya dengan demokrasi dan legitimasi. Partisipasi politik, demokrasi, dan legitimasi memiliki kerangka hubungan yang sangat erat. Partisipasi politik dalam hubungannya dengan demokrasi berpengaruh pada legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara.

Alat ukur untuk mengetahui partisipasi, demokratisasi, dan legitimasi warga negara Indonesia dapat dilihat salah satunya melalui perilaku politiknya. Perilaku politik itu dapat dilihat dari berbagai jenis yaitu melalui aktivitas dan antusiasme masyarakat mendatangi tempat pencoblosan dalam pemilihan umum. Bentuk perilaku politik ini menjadi alat analisis untuk melihat partisipasi politik masyarakat itu sendiri. Termasuk di dalamnya pada pemilihan legislatif dan presiden tahun 1999 sampai dengan pemilu 2014 yang lalu.

Data resmi KPU Pusat meliris bahwasanya partisipasi pemilih sejak pemilu 1999 sampai dengan pemilu 2014 bergerak fluktuatif. Pada pemilu legislatif, penurunan partisipasi pemilih sekitar 10% konsisten terjadi sampai pada pemilu 2009. Sementara itu pada pemilu 2014, angka partisipasinya naik sebesar 5%. Pada kasus pilpres, tercatat dalam pemilu 2014 pertama kalinya dalam sejarah angka partisipasinya lebih rendah dibandingkan pemilu legislatif.

Unik memang *trend* negatif penurunan angka partisipasi tahun 2014, padahal secara teknis pilpres itu lebih sederhana dan tidak serumit pileg. Namun, angka statistik menunjukkan minat masyarakat untuk pergi ke TPS saat pilpres menurun.

## 2. Studi Pustaka

### 2. 1. Partisipasi Politik

Peneliti melakukan kategorisasi terhadap empat tokoh pemikir politik yang pada akhirnya akan menghasilkan beberapa indikator partisipasi politik, yang dijelaskan dalam Tabel 1, sedangkan bentuk-bentuk partisipasi warga dalam politik menurut Almond disajikan pada Tabel 2.

Tabel 1. Indikator Partisipasi Politik

Tokoh	Indikator Partisipasi Politik
<b>Huntington dan Nelson</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berupa kegiatan bukan sikap-sikap dan kepercayaan</li> <li>Memiliki tujuan mempengaruhi kebijakan public</li> <li>Dilakukan oleh warga negara preman (biasa)</li> </ol>
<b>Herbert McClosky</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berupa kegiatan-kegiatan sukarela</li> <li>Dilakukan oleh warga negara</li> <li>Warga negara terlibat dalam proses-proses politik</li> </ol>
<b>Miriam Budiardjo</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berupa kegiatan individu atau kelompok</li> <li>Bertujuan ikut aktif dalam ke-hidupan politik, memilih pim-pinan publik atau mempengaruhi kebijakan publik.</li> </ol>
<b>Ramlan Surbakti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik</li> <li>Dilakukan oleh warga negara biasa</li> </ol>

Tabel 2. Bentuk Partisipasi Politik

Konvensional	Non-Konvensional
1. Pemberian suara	1. Pengajuan petisi
2. Diskusi politik	2. Berdemonstrasi
3. Kegiatan kampanye	3. Konfrontasi
4. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan	4. Mogok
5. Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif	5. Tindakan kekerasan politik harta benda (pengeboman, pembakaran)
	6. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan)
	7. Perang Gerilya dan Revolusi

Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga Negara yang memenuhi syarat. Pada zaman modern ini pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa hal; *Pertama*, pemilu menempati posisi penting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. *Kedua*, pemilu menjadi indikator negara demokrasi. Dhal mengatakan bahwa dua dari enam ciri lembaga-lembaga politik yang dibutuhkan oleh demokrasi skala besar adalah berkaitan dengan pemilu, yaitu para pejabat yang dipilih dan pemilu yang bebas adil dan berkala. *Ketiga*, pemilu penting dibicarakan juga terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dari pemilu, pada fase tersebut Huntington menyebut pemilu sebagai alat serta tujuan dari demokratisasi. Pernyataan tersebut berangkat dari kenyataan tumbangunya penguasa-penguasa otoriter akibat dari pemilu yang mereka sponsori sendiri karena mencoba memperbaharui legitimasi melalui pemilu. (Ranadirekta, 2007).

Rakyat membuat kontrak sosial dengan para pemimpin melalui pemilu. Pada saat pemilu rakyat dapat memilih figur yang dapat dipercaya untuk mengisi jabatan legislatif dan eksekutif. Di dalam pemilu, rakyat yang telah memenuhi syarat untuk memilih, secara bebas, dan rahasia, menjatuhkan pilihannya pada figur yang dinilai sesuai dengan aspirasinya<sup>1</sup>. Oleh karena itu, kekuasaan yang dimiliki oleh para pemimpin sekarang bukanlah muncul karena dirinya sendiri, melainkan titipan dari rakyat melalui pemilu.

Intinya, pemilihan umum adalah suatu contoh partisipasi politik yaitu kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Pada hakekatnya pemilihan umum merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam badan-badan perwakilan rakyat untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Sangat bermaknanya pemilu bagi semua orang, maka pemilihan yang menjadi indikator demokratisnya suatu negara.

Berangkat dari batasan pengertian partisipasi politik dalam pemilihan umum tersebut. Pada akhirnya penelitian ini juga tidak bisa menafikan karakteristik sosial yang terjadi dalam objek penelitian, terkhusus Garut. Sebab pada akhirnya peneliti juga harus bisa mengiyakan ada faktor lain yang mempengaruhi partisipasi politik ini. Studi hasil penelitian Seymour Martin Lipset, dalam *Political Man: the Social Bases of Politics* (1960) dalam Miriam Budihardjo<sup>2</sup> menegaskan dengan sangat terang bahwasanya karakteristik sosial berpengaruh terhadap partisipasi politik. Karakteristik sosial tersebut meliputi

1

pendapatan, pendidikan, pekerjaan, ras, jenis kelamin, umur, tempat tinggal, situasi kondisi, status dan organisasi. Dengan demikian karakteristik sosial khas kegarutan, menjadi bumbu pelengkap dalam pembahasan penelitian ini.

## 2.2 Pilihan Rasional

Coleman<sup>3</sup> memaknai teori pilihan rasional sebagai tindakan perseorangan mengarah kepada sesuatu tujuan dan memandang tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan. Ada dua unsur utama dalam teori Coleman (Budihardjo, 1998) yakni aktor dan sumber daya. Aktor adalah yang memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Sedangkan sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor.

Buah karya pemikiran Downs (Marsh & Stoker, 2010), pilihan rasional berkembang dalam arah yang bervariasi. Teori pilihan rasional mengambil preferensi, keyakinan, dan strategi *feasible* individu sebagai penyebab tindakan yang mereka lakukan. Varian mainstream dari pilihan rasional mengasumsikan bahwa individu mempunyai semua kapasitas rasional, waktu, dan keterikatan emosi yang penting untuk memilih arah tindakan baik, tak peduli betapa kompleksnya pilihan tersebut. Masalah paling sederhana secara konseptual dalam pembuatan keputusan parametrik dalam kepastian ketika setiap tindakan mempunyai hasil yang diketahui (sehingga tidak ada resiko atau ketidakpastian) dan hubungan antara aksi dan akibat tak dipengaruhi oleh tindakan individu lain. Individu diasumsikan mampu menilai hasil, maupun aksi.

Lebih lanjut Downs<sup>4</sup> mengatakan, dalam konteks pemilihan umum orang memilih calon atau partai politik, apabila calon atau partai tersebut dipandang dapat membantu pemilih memenuhi kepentingan dasarnya yakni kehidupan ekonomi. Cukup dengan mempersepsikan keadaan ekonomi dirinya (*egosentrik*) di bawah sebuah pemerintahan (partai atau calon) tertentu sekarang ini dibanding sebelumnya (*retrospektif*), dan yang akan datang dibanding sekarang (*retrospektif*), dan yang akan datang dibanding sekarang (*prospektif*); dan evaluasi umum seorang pemilih atas keadaan ekonomi nasional (*sosiotropik*) di bawah pemerintahan sekarang dibanding tahun sebelumnya (*retrospektif*), dan keadaan ekonomi nasional dibawah pemerintahan sekarang dibanding tahun-tahun yang akan datang (*prospektif*).

Lembaga sosial telah berperan besar dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Seperti yang diaungkapkan oleh Friedmen dan Hechter yang menjelaskan adanya kemampuan dari lembaga sosial untuk memberikan sanksi positif dan negatif kepada masyarakat sehingga mempengaruhi masyarakat untuk menentukan ikut berpartisipasi ataukah tidak. Dari penjelasan Friedmen dan Hecdter tersebut dalam permasalahan partisipasi politik lembaga sosial mampu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam politik. Berdasarkan pengamatan peneliti, lembaga sosial yang turut berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat antara lain adalah penyelenggara pemilu (KPU, PPK, PPS, dan KPPS), Partai Politik, Media Massa, dan Ormas.

## 3. Metodologi Penelitian

Pendekatan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah campuran atau *mix* metode kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dilengkapi dengan data kualitatif dan sebaliknya untuk dicapai satu analisis yang lebih komprehensif. Metode kuantitatif dimaknai berusaha mencari generalisasi atas masalah yang diteliti.

Kerangka teori pada metode kuantitatif dimaksudkan untuk diuji kebenarannya dan dibangunnya kerangka pemikiran baru atas sebuah permasalahan. Sementara itu pada

---

<sup>3</sup> George Ritzer & Douglas J. Goodman. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana. hlm. 394

<sup>4</sup> Saiful Mujani, *op.,cit.* hlm. 33

metode kualitatif, penelitian dimaksudkan untuk mencari pemaknaan atau kedalaman atas sebuah permasalahan.

Sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang diperoleh melalui *interview* terhadap beberapa sampel. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa dokumentasi angka dan data resmi hasil pemilu yang terdapat di KPU Kabupaten Garut.

Data sekunder tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mengetahui daerah dan desa mana yang mengalami kenaikan angka secara signifikan pada pileg 2009 ke 2014 dan yang mengalami penurunan angka secara signifikan pada pilpres 2009 ke 2014 (KPU, 2014a). Dengan pola pengurutan *top ranking* tersebut pada akhirnya didapatkan 42 desa yang memenuhi kaidah tersebut (KPU, 2014b).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara yang menggunakan panduan kuisioner terhadap 44 orang responden yakni penyelenggara pemilu tingkat desa (PPS) sebanyak 44 orang. Pengambilan 44 orang ini didasarkan kepada asumsi minimal 10% dari jumlah populasi desa yang berjumlah 442 desa/kelurahan se-Kabupaten Garut. Disamping *interview* terhadap responden, peneliti juga melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) terhadap delapan asisten peneliti yang melakukan wawancara dan observasi terhadap para responden. FGD ini dilakukan untuk melakukan pendalaman terhadap semua data dan analisa, juga mengingat para asisten peneliti ini adalah penyelenggara pemilu sehingga tidaklah berlebihan mereka memiliki wawasan, pengetahuan, dan pengalaman sehingga menjadi bagian *participant observation* (Cresswell, 2009).

#### 4. Hasil Penelitian

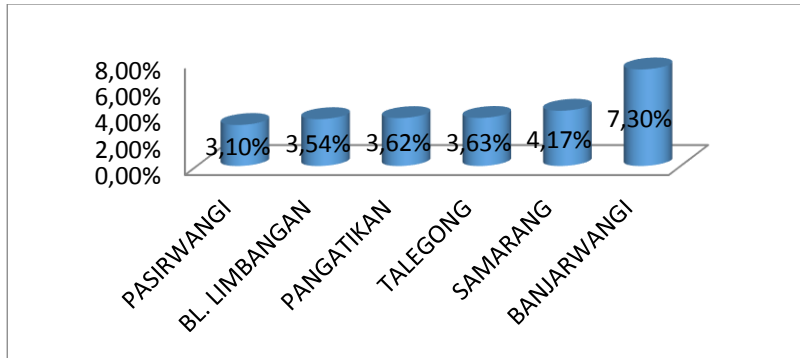
Garut memang unik untuk ditilik. Sejarah memang tidak pernah bohong. Dan dengan sejarah pula kita mengetahui bahwa Garut memiliki dinamika politik dan ideologi yang sangat hidup. Tentu saja *common sense* melek politik warga Garut ini mempengaruhi pula partisipasi politik warganya dalam memberikan atau tidak memberikan aspirasi politik pada pemilihan umum. Sehingga dapat dikatakan memberikan atau tidak memberikannya partisipasi politik tersebut (termasuk partisipasi masuk TPS) itu penuh kesadaran karena memiliki pengetahuan kemelek-politikan. Ternyata melihat kondisi dan fenomena di atas, kemelek-politikan warga Garut di atas standar kabupaten lainnya di Indonesia.

Garut terdiri dari 42 kecamatan dan terbagi ke dalam 5 Daerah Pemilihan (Dapil) pada pemilu tahun 2009 dan 2014. Warga Garut yang berhak untuk memberikan aspirasi politiknya yang terdapat dalam kolom Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 tergolong banyak, yakni berjumlah 1.769.224 orang. Dan mengalami perubahan penambahan jumlah pemilih menjadi 1.814.981 orang.

Jika mengkaji teori Milbrath dan Goel yang terdapat dalam kerangka teori sebelumnya, para pemilih yang ada di Kabupaten Garut tersebut sebagian besar masuk dalam kategori *spectator*. Umumnya mereka sebagian besar bukan aktifis partai. Mereka hanya warga biasa yang menggunakan hak pilihnya ketika pemilu. Setelah selesai mereka tidak lagi terlibat dalam kegiatan politik apapun.

Dan jika menganalisis hasil partisipasi politik pada warga Garut yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif antara tahun 2009 dengan tahun 2014 hasilnya sangat variatif. Namun, kalau dilihat dari total kumulatif *trend*-nya sama dengan *trend* nasional yaitu mengalami kenaikan, yakni sebesar 0.38%. Berikut ini adalah peta sebaran kecamatan-kecamatan mana saja yang mengalami kenaikan. Dalam gambar, peta kecamatan yang berwarna hijau mengalami kenaikan, sedangkan yang berwarna putih mengalami penurunan. Lebih jelas mengenai peta kenaikan dan penurunan angka partisipasi pemilih pada pileg tersebut, tersaji dalam gambar berikut ini:





Gambar 3. Top Six Kenaikan Partisipasi Pemilih

Setelah menganalisa data partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan presiden tahun 2014, diperoleh peta sebaran kecamatan yang mengalami kenaikan dan penurunan. Kecamatan yang berwarna pink mengalami jumlah penurunan angka partisipasi pemilih. Sedangkan kecamatan yang berwarna putih justru mengalami kenaikan pemilih.



Gambar 4. Peta sebaran Penurunan Partisipasi Pemilih di Pilpres

Analisa peneliti terhadap penurunan angka partisipasi pemilih pada pilpres tidak hanya pada level kecamatan. Dari data yang tersaji, desa yang mengalami penurunan angka partisipasi pemilih secara drastis terdapat di Desa Karang Sari Kecamatan Pangatikan yang menembus penurunannya sampai kepada level 27.60%.



Gambar 5. Desa dengan Penurunan Terendah Partisipasi Politik

Pengkajian yang lebih mendetail tentang penurunan angka partisipasi ini ada banyak faktor yang melatar belakangi. Faktor kemudahan teknis dalam mencoblos antara pileg dan pilpres tidak turut mempengaruhi pemilih. Bahkan pilpres yang lebih mudah dalam teknis cara mencoblos justru tidak menjadi motivasi pemilih untuk datang ke TPS.

Penurunan angka partisipasi pemilih pada pilpres di setiap daerah di Kabupaten Garut dilatarbelakangi oleh alasan yang berbeda di setiap daerahnya. Alasan hujan menjadi alasan orang enggan datang ke TPS pada pilpres 2014 seperti yang terjadi di Desa Jayamukti Cihurip.

Alasan utama yang menyebabkan penurunan angka partisipasi pada pilpres dan kenaikan angka partisipasi pada pileg lebih disebabkan oleh kedekatan emosi antara calon dengan pemilih. Unsur kedekatan emosi ini menjadi penting seperti yang tertuang dalam kerangka teori di awal pembahasan.

Cara mengasah kedekatan emosi para caleg dengan pemilih pun dirasa sangat menyentuh akar rumput. Hal inilah yang membedakan dengan pilpres. Para caleg dengan segala bentuk ajakannya, mereka langsung melakukan sosialisasi ajakan memilih. Biasanya caleg lebih populer masuk dan keluar pengajian untuk menyosialisasikan dirinya. Ada pula yang membagikan sembako, masuk ke olahraga antar kampung, ketuk pintu, nempel sendiri stiker pada setiap rumah, dll. Bahkan terdapat seorang caleg X dari partai Demokrat di Kabupaten Garut pada tahun 2014 yang memiliki gagasan unik, dengan menggembor-gemborkan ajakan, kalau dia menang menjadi anggota dewan, maka separo gajinya akan diberikan kepada masyarakat. Adapula para caleg yang kerjanya membagi-bagikan barang, seperti: kopi, kerudung, kopiah, sajadah, mukena, bahkan bra (pakaian dalam perempuan) sekalipun di Kabupaten Garut ini. Pola inilah yang mendekatkan secara emosi antara pemilih dengan caleg. Yang pada akhirnya motivasi untuk berangkat ke TPS-pun tumbuh secara bergairah.

Sejauh analisa peneliti terhadap pengakuan responden, motivasi pribadi atau kelompok untuk mendapatkan proyek, kalau jagoan calegnya menang, sangatlah kentara. Hal ini juga yang bisa menjadi pemantik orang-orang datang ke-TPS. Disamping alasan pragmatis lainnya, seperti *money politic*, orang dengan sangat bersemangat datang ke-TPS. Rasa penasaran siapa yang akan menang dalam caleg pun menjadi daya dorong orang datang ke-TPS.

Transaksi *money politic* yang dilakukan pada pileg jauh lebih sengit daripada pilpres. Hal ini memang bisa difahami, bahwasanya persaingan di pileg jauh lebih ketat daripada di pilpres. Tarif *money politic* pada saat pileg bervariasi antara 20.000, 50.000, 75.000, atau 100.000. Tergantung kepada simbol status konstituen. Kalau statusnya tokoh semakin tinggi, niscaya berbanding lurus dengan nilai "fulusnya". Dan sebaliknya, semakin *low* status, maka nilainya semakin rendah. Bahkan peneliti menemukan ada caleg yang memberikan *money politic* dalam amplop, isinya hanya sebesar 5.000,- yang dibagikan di daerah perkebunan di Garut Selatan. Diakui atau tidak, potret *money politic* ternyata memberikan langkah motivasi dan memperkuat "*nawaitu*" orang untuk datang ke-TPS.

Peran lembaga sosial dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat seperti yang diamanatkan oleh teori Friedman dan Hecdter pun berbeda tampilannya antara di pileg dan pilpres. Sosialisasi pileg lebih gencar daripada pilpres. Hal ini diakui oleh semua responden yang diteliti. Organisasi penyelenggara pemilu seperti PPS seakan sudah kehabisan tenaga untuk melakukan sosialisasi dan ajakan pilpres. Mata rantai pemilihan yang panjang pada penyelenggaraan pemilu tahun 2013-2014 dimulai dari pemilihan Gubernur Jawa Barat, Pilkada Garut putaran I, Pilkada Garut putaran 2, Pileg, dan terakhir adalah Pilpres, menjadi kambing hitam kebosanan sosialisasi pilpres ini.

Di setiap pemilihan tersebut hampir mayoritas PPS komposisinya tidak berubah. Sehingga ada adagium populis di masyarakat: "*Apapun pemilihannya, anggota PPS-nya tetap itu-itu juga*". Walau sebenarnya sekarang sudah ada regulasi yang mengantisipasi akan hal tersebut dengan membatasi penyelenggara pemilu sampai level bawah, hanya



menjabat dua periode. Kejenuhan para penyelenggara pemilu ini, diperparah dengan anggapan bahwa untuk pilpres teknis pencoblosannya mudah, sehingga tidak perlu bersusah-susah untuk melakukan sosialisasi. Jikalau ada sosialisasi itu hanya ceremonial dan alakadarnya. Ditambah lagi paketan capres dan cawapres 2014 hanya ada dua pasangan. "*Anak kecil saja sudah pada tahu melihat di TV, apalagi pemilih yang pasti sudah masuk kategori dewasa*", demikian anggapan para responden sebagai penyelenggara pemilu di level yang paling bawah.

Rona kejenuhan pun tertambat pula pada beberapa pemilih. Berbeda dengan pileg, pilpres seakan menjadi sepi peminat. Pengakuan salah satu responden di Desa Ciwangi Limbangan, pilpres 2014 terasa jenuh. Bayangkan ada banyak aktivitas pemilihan umum yang harus dilakoni sebelum pada saat pilpres 2014. Diantaranya pemilihan Gubernur Jawa Barat, Pilkada Garut putaran I, Pilkada Garut putaran 2, Pileg, dan terakhir adalah Pilpres. Masyarakat menjadi jenuh dan apatis terhadap semua pemilihan-pemilihan umum tersebut, yang ujung-ujungnya menanyakan manfaatnya pada diri, dan akhirnya enggan untuk datang ke TPS pada pilpres 2014.

Yang patut dicermati dari minimnya partisipasi pemilih pada pilpres adalah bentuk karakteristik sosial yang terjadi pada waktu itu. Masyarakat Garut terkenal dengan profil masyarakat religiusnya. Pada pilpres 9 Juli 2014, kebetulan bertepatan dengan bulan suci Ramadhan. Tentu bisa ditebak, dalam kultur asketisme masyarakat Sunda, fakta di lapangan biasanya pada bulan-bulan seperti itu akan menurunkan semangat dan etos kerja. Hal ini diprediksi berdampak pula kepada turun dan sepi peminatnya TPS.

Inovasi sosialisasi pemilu yang terjadi di pileg dan pilpres seakan berbeda. Di pileg, baik calon maupun penyelenggara pemilu berjibaku melakukan segala macam inovasi sosialisasi. Para caleg pun seakan tidak mau diam dengan menebar semua bentuk alat kontak, seperti: stiker, spanduk, baligo, dsb. Hampir setiap jalan, gang-gang sempit, jembatan, lorong-lorong, bahkan kaos yang dipakai tukang beca pun tak luput dari atribut kampanye. Semua bermuara kepada ajakan untuk mencoblos.

Fenomena ini tampak jauh berbeda dengan nuansa pilpres. Penyelenggara pemilu tingkat kabupaten, KPUD Garut ketika pilpres 2014 saja hanya memasang 928 spanduk (KPU, 2014b). Harus berhadapan sebelumnya dengan fenomena gegap gempitanya atribut pileg yang dipasang oleh seluruh caleg. Dari sisi media komunikapun tentunya sangatlah berbeda antara pileg dan pilpres. Sehingga hal ini sesuai dengan teori media pada dunia politik, bahwasanya kemeriahan komunikasi politik pileg dan pilpres pada akhirnya berpengaruh terhadap partisipasi orang untuk datang mencoblos.

Kasus khusus di Desa Cigedug Kec. Cigedug. Inovasi penyelenggara pemilu di sana, mereka mencoba mendesain dan mendekorasi TPS sedemikian rupa, sehingga masyarakat menjadi tertarik dengan keunikan dan kemeriahan TPS yang ada di sana. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, manipulasi data pun sebenarnya bisa mempengaruhi angka partisipasi pemilih. Sebagai contoh kasus di TPS X di Desa Pasirkiamis Kec. Pasirwangi, pengakuan responden telah terjadi pencoblosan ganda pada pemilu legislatif 2014. Pemilih yang tidak datang, surat suaranya dicoblos. Satu orang bahkan bisa mencoblos lebih dari satu kali. Hal ini tentu saja akan melahirkan angka partisipasi pemilih yang tinggi. Padahal faktanya pemilih tidak datang ke-TPS.

Ketika responden ditanya mengenai kompetensi penyelenggaraan pemilu dengan kualitas SDM di sektor pendidikan, kebanyakan responden menjawab pendidikan tidak terlalu berpengaruh terhadap kualitas penyelenggara pendidikan, terkhusus di tingkat desa. Responden berargumen daya juang, militansi, dan kedekatan dengan masyarakatlah yang mempengaruhi sosialisasi dan ajakan untuk mencoblos. Dari responden yang diteliti, hanya PPS di Cibatu yang bertitel S2. Selebihnya S1, bahkan banyak yang lulusan SMA. Kebanyakan profesi responden atau PPS adalah sebagai buruh tani.

Tidak hanya para responden saja yang melakukan sosialisasi pemilu. Ketika ditanya, siapa orang yang paling berjasa dalam menyosialisasikan dan mengajak

masyarakat untuk mencoblos, justru jawaban signifikan adalah kepala desa. Bahkan jasa kepala desa ini katanya melebihi perjuangan para penyelenggara pemilu seperti PPS di tingkat desa. Terlepas dari penelitian ini tidak mengkaji motivasi kepala desa apakah ajakannya bersifat politis karena mendukung salah satu caleg atau capres, namun, fakta membuktikan sosialisasi ajakan yang paling kuat justru dari kepala desa.

Peran kepala desa memang sangat sentral dalam mempengaruhi masyarakat untuk menyalurkan partisipasi politiknya jauh melampaui peran PPS. Setelah peneliti melakukan analisa mendalam, ada dua alasan yang melatarbelakangi akan hal tersebut. *Pertama*, kepala desa memiliki wewenang teritorial yang jelas dan berbatas waktu yang panjang. Sedangkan PPS sebaliknya. *Kedua*, keberadaan PPS ketika melakukan pencalonan penyelenggaraan pemilu di level desa tersebut, harus menempuh rekomendasi secara formal atau tidak formal dari kepala desa. Hal ini memunculkan iklim sub ordinasi, seolah-olah PPS itu di bawah kepala desa. Maka tak ayal banyak temuan kebijakan PPS yang "diatur" oleh kepala desa.

Kepala desa yang turun tangan langsung mengajak masyarakat dalam mencoblos memang perannya sangat signifikan. Terlepas dari motif ajakannya seperti apa. Sebagai contoh kasus, di Desa Baru Kecamatan Malangbong, kepala desa tersebut kebetulan bertindak sebagai caleg yang menang. Caleg x yang bertindak sebagai kepala desa ini sangat taktis dalam menghimpun massa untuk datang ke TPS. Hal inilah yang mengakibatkan angka partisipasi pemilih naik secara signifikan di daerah tersebut.

Kuasa kepala desa memang luar biasa. Sebenarnya kalau dikaji secara seksama, peran kepala desa itu di satu sisi mampu membuka kran partisipasi, namun di sisi lain juga mampu menyumbat kran partisipasi pemilih tersebut. Peneliti melakukan kajian khusus terhadap salah satu desa dengan angka partisipasi pemilih pilpres yang paling rendah. Seperti yang sudah dipetakan sebelumnya, desa yang dimaksud adalah Desa Karang Sari Kecamatan Karangpawitan yang menembus level penurunan 27.60%.

Setelah dikaji dengan seksama, kepala desa dari Desa Karang Sari tersebut sebelumnya pada pileg 2014 mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Bisa ditebak, pencalonan tersebut bisa mendongkrak angka partisipasi pemilih. Namun, karena persaingan sangat ketat, kepala desa yang *nyambi* sebagai caleg tersebut gagal menduduki kursi legislatif. Efek dari pileg ini berdampak terhadap pilpres. Karena alibi psikologis, apatisme, rasa malu atau perasaan lainnya yang berdampak dari kegagalan pencalonannya, pada akhirnya menghambat daya juang untuk sosialisasi ajakan memilih pada masyarakatnya dalam pilpres.

Selain kepala desa, tokoh agama memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengajak masyarakat untuk mencoblos. Bahkan dalam penelitian ini terkuat seorang tokoh agama, yang bernama M. Iha asal Desa Tegallega Bungbulang, beliau yang hanya lulusan SD mampu memobilisasi masyarakatnya untuk datang mencoblos. Dan akhirnya beberapa TPS di kampungnya memperoleh angka partisipasi pemilih yang signifikan. Terakhir adalah factor kepemilikan KTP elektronik, berdasarkan Kania (2018), Garut masih terkendala teknis pembuatan e-KTP yang sangat penting dalam pendataan pemilu.

## **5. Kesimpulan Dan Rekomendasi**

### **5.1 Kesimpulan**

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu: *Pertama*, peta partisipasi pemilih dalam pileg dan pilpres di Kabupaten Garut mengalami kenaikan dan penurunan. *Kedua*, upaya sosialisasi partisipasi politik yang merupakan bagian paling penting dalam sebuah pemilihan umum. Friedmen dan Hechter melihat adanya pengaruh lembaga sosial dalam partisipasi politik. Dalam temuan peneliti terdapat lembaga sosial yang turut berpengaruh dalam menaik-turunkan partisipasi politik masyarakat, yakni: Kepala Desa, Calon legislatif, PPS, dan tokoh agama. *Ketiga*, kedekatan emosional calon pileg dan pilpres turut mempengaruhi partisipasi dan persepsi politik

masyarakat. *Keempat*, rasionalitas masyarakat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menentukan partisipasi politik. Pertimbangan ekonomi dan politik uang menjadi salah satu motivasi dalam partisipasi politik. Namun, kedekatan calon dengan pemilih menjadi kunci signifikan dalam pengaruhnya terhadap partisipasi politik masyarakat.

Dalam konteks tingkat partisipasi politik masyarakat ternyata dipengaruhi oleh adanya praktik politik uang atau pemberian barang menjelang pemilu. Fenomena tersebut dikarenakan masyarakat mulai dipengaruhi oleh pemikiran yang rasional dalam memandang partisipasi politik. Praktik politik uang, barang, harapan mendapat proyek, dan motif ekonomi lainnya di Kab. Garut dalam hal partisipasi politik telah mampu dijelaskan melalui teori pilihan rasional Coleman dan Downs. Namun teori tersebut dalam penelitian ini tidak banyak menjelaskan adanya pengaruh tingkat pendidikan penyelenggara dan pemilih dalam mempengaruhi pemikiran rasional seseorang.

## 5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai partisipasi politik, maka peneliti memberikan rekomendasi untuk kiranya dapat dijadikan pertimbangan bagi para pembaca/masyarakat umum, pemerintah, maupun penyelenggara pemilu. *Pertama*, masyarakat harus terus meningkatkan kesadarannya akan pentingnya partisipasi dalam politik. Partisipasi politik dalam setiap pemilihan umum akan menentukan pemimpin yang akan turut menentukan nasib masyarakat selama lima tahun. *Kedua*, penyelenggara pemilu di level desa seharusnya meningkatkan perannya dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terutama pada waktu pilpres. *Ketiga*, para penyelenggara pemilu, pemerintah, ataupun partai politik seharusnya melakukan sosialisasi dengan cara-cara yang lebih inovatif dan melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat terutama ketika pemilu presiden berlangsung yang sepi peminat. *Keempat*, *civil society* seharusnya memaksimalkan pergerakannya dalam hal edukasi politik kepada masyarakat. *Kelima*, perlu adanya penelitian dalam mengukur komunikasi dan motivasi politik lembaga sosial seperti: kepala desa dalam memobilisasi partisipasi politik masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajip, R. (2000). *Ensiklopedi Sunda : Alam, Manusia, dan Budaya*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Al, C. (1999). *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S,M, Kartosoewirjo: Fakta dan Data Sejarah Darul Islam*. Bandung: Darul Falah.
- Budihardjo, M. (1998). *Partisipasi dan Partai Politik*. Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Yayasan Penerbit Obor
- Cresswell, J.W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications, Inc
- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- David, M., & Gerry, S. (2010). *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media.
- George, R., & Douglas, J. G. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Hendarmin, R. (2007). *Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Bandung: Fokusmedia.
- Herbert, F., & Lance, C. (1970). *Indonesian Political Thinking (1945-1965)*. Ithaca New York: Cornell University Press.
- Herbert, M. C. (2010). International Encyclopedia of the Social Science, . Dalam Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Heri, M. T. (2012). *Multiculturalism Mainstreaming at School: Research at Public High school 6 and Public Vocational High School 3 Garut West Java*. Jakarta: Kemenag RI.
- Jhon, W. C. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications, Inc.
- Joseph, S. (1947). *Capitalism, Socialism, and Democracy*. New York: Harper.
- Julia, A. (2003). *Plato: A Very Short Introduction*. United States: Oxford University Press Inc.

- Kania, I., Alamanda, D.T., Anggadwita, G., Permatasari, A. (2018). Full Polemic of e-KTP Service, Public Obligations versus Public Service. *1<sup>ST</sup> International Conference Industrial and Manufacturing Engineering (ICI&ME)*. Medan: Univeristy of Sumatera Utara
- Keith, F. (1990). Political Sciology : A Cretial Introdotution. Dalam Damsar, *Pengantar Sosial Politik*.
- KPU. (2014a) Data Resmi KPU, seperti yang tertuang dalam buku: *Suara Rakyat; Menapak Jejak menuju Kursi Parlemen 2014 di Kabupaten Garut*. Garut: KPUD Garut dan badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 30.
- KPU. (2014b). Data Resmi KPU, seperti yang tertuang dalam buku: *Suara Rakyat; Dari Garut untuk Istana Negara*. Garut: KPUD Garut dan badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 40.
- KPU. (2014c). Data Resmi KPU, seperti yang tertuang dalam buku: *Suara Rakyat; Dari Garut untuk Istana Negara*. Garut: KPUD Garut dan badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 56
- Leonard, M. H. (2007). *A Foucauldian approach to international law: descriptive thoughts for normative issues*. Great Britain: MPG Books Ltd.
- Marsh, D & Stoker, G. (2010). *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media, 82
- Miriam, B. (1982). *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Miriam, B. (1998). *Partisipasi dan Partai Politik. Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Mochtar, M. (2003). *Negara, Kapital dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nelson, H. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Reneka Cipta.
- Pamungkas, S. (2009). *Prihal Pemilu*. Yogyakarta: Lab. Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM.
- Ramlan, S. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia.
- Ranadireksa, H. (2007) . *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Bandung : Fokusmedia, 173-174.
- Samuel, P. H., & Joan, N. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudijono, S. (1995). *Prilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press .
- Tim Suara Rakyat. (t.thn.). *Menepak Jejak menuju Kursi Parlemen 2014 di Kabupaten Garut*. Garut: KPUD Garut dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Tim Penyusun Buku KPU. (2014). *Suara Rakyat; Dari Garut untuk Istana Negara*. Garut: KPUD Garut dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- William, L. (2000). *Memastikan Arah Baru Demokrasi*. Jakarta: FISIP UI.